

**AKAD GADAI KEBUN JAGUNG DI DESA NATAM BARU, BADAR, ACEH
TENGGERA DALAM PERSPEKTIF FATWA DEWAN SYARIAH
NASIONAL (DSN)**



Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I pada jurusan
Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam

Oleh:

RUSDANIAR. HM

NIM: I000110001

NIRM:11/X/02.1.2/0233

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2020

HALAMAN PERSETUJUAN

**AKAD GADAI KEBUN JAGUNG DI DESA NATAM BARU, BADAR, ACEH
TENGGERA DALAM PERSPEKTIF FATWA DEWAN SYARIAH
NASIONAL (DSN)**

PUBLIKASI ILMIAH

Oleh:

RUSDANIAR. HM

I 000 110 001

11/X/02.1.2/0233

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh

Dosen

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Harun' with a stylized flourish at the end.

Drs. Harun. MH.

NIK.343

HALAMAN PENGESAHAN

**AKAD GADAI KEBUN JAGUNG DI DESA NATAM BARU, BADAR, ACEH
TENGGERA DALAM PERSPEKTIF FATWA DEWAN SYARIAH
NASIONAL (DSN)**

OLEH

RUSDANIAR. HM

I000110001

11/X/02.1.2/0233

**Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada hari Sabtu, 17 November 2020
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat**

Dewan Penguji:

1. **Drs. Harun, MH.**
(Ketua Dewan Penguji)
2. **Azhar Alam, S.E., Lc., M.SEI**
(Anggota I Dewan Penguji)
3. **Dr. Imron Rosyadi, M.Ag.**
(Anggota II Dewan Penguji)

(.....)

(.....)

(.....)

Dekan,



Dr. Syamsul Hidayat, M.Ag

NIK. 606

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam publikasi ilmiah ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 19 Agustus 2020

Penulis



RUSDANIAR. HM

I000110001

11/X/02.1.2/0233

AKAD GADAI KEBUN JAGUNG DI DESA NATAM BARU, BADAR, ACEH TENGGERA DALAM PERSPEKTIF FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL (DSN)

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan upaya untuk memaparkan mengenai akad gadai kebun jagung yang terjadi di Desa Natam Baru, Badar, Aceh Tenggara. Penelitian ini menarik untuk dilakukan karena adanya pemanfaatan barang jaminan (*marhun*) oleh pihak penerima gadai (*murtahin*). Dan akan difokuskan pada masalah bagaimana akad gadai tersebut dan bagaimana tinjauan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) terhadap akad gadai tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui akad gadai kebun jagung yang dilaksanakan oleh masyarakat di Desa Natam Baru, Badar, Aceh Tenggara tersebut telah sesuai dengan peraturan akad gadai dalam fatwa Dewan Syariah Nasional atau belum. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dan data-datanya didapatkan menggunakan metode observasi dan wawancara (*interview*). Metode analisis datanya menggunakan teknik analisis data secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan, *pertama*, akad gadai yang dilakukan oleh penggadai (*rahin*) dan penerima gadai (*murtahin*) telah memenuhi unsur-unsur gadai menurut hukum syara' baik rukun maupun syarat gadai, tetapi dalam praktiknya sering terdapat unsur pemanfaatan barang jaminan (*marhun*) oleh *murtahin*. *Kedua*, dalam perspektif fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) terhadap akad gadai kebun jagung pada masyarakat desa Natam Baru, Badar, Aceh Tenggara ialah tidak sah, dikarenakan adanya unsur pemanfaatan barang jaminan (*marhun*) oleh *murtahin*.

Kata Kunci : Akad Gadai, Pemanfaatan *marhun*, Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN)

ABSTRACT

This thesis is an attempt to describe the pawn contract on the cornfield that happened in the Natam Baru Village, Badar, Southeast Aceh. This research is interesting to do because of the use of pawn guarantee item (*marhun*) by the pawn recipient (*murtahin*). And will focus in the issue of how the pawn contract and how the review of the National Sharia Board Fatwa (DSN) about the pawn contract. The purpose of this research was to know the pawn contract of the cornfield that was implemented by the community in Natam Baru Village, Badar, Southeast Aceh was in adjusted with the pawning contract rules in the Fatwa of the National Sharia Board or not. This research is a field research and the data are obtained using observation and interview methods. Data analysis method uses qualitative data analysis techniques. Based on the research results, it can be concluded. *First*, the pawn contract done by pawnshop (*rahin*) and the pawn recipient (*murtahin*) has fulfilled the elements of pawning according to the shara law, both the pillars and the pawn contract terms, but in the practice there are often elements of the use of the pawn guarantee item (*marhun*) by the pawn recipient (*murtahin*). *Secondly*, in the perspective of the Fatwa of the National Shara Board (DSN) on the pawn contract for cornfield in the community of

Natam Baru Village, Badar, Southeast Aceh is illegal, because to the element of the use of the pawn guarantee item (*marhun*) by *murtahin*.

Key words : Pawn Contract, The Use of *Marhun*, Fatwa of the National Sharia Board (DSN)

1. PENDAHULUAN

Hukum Islam mengatur peri kehidupan manusia secara menyeluruh dan mencakup segala aspeknya. Hubungan manusia dengan Allah diatur dalam bidang ibadat dan hubungan manusia dengan sesamanya diatur dalam bidang muamalat.¹

Pada umumnya perjanjian gadai yang dilakukan pada masyarakat di desa Natam Baru ialah secara lisan antara kedua belah pihak dan membahas tentang luas kebun dan jumlah uang gadai dengan menyebutkan masa gadainya. Yang menjadi persoalan dalam sistem gadai kebun ini adalah *rahin* akan kesulitan mengembalikan uang kepada pemilik uang (*murtahin*) dikarenakan kebun tersebut masih dalam perjanjian gadai. Apabila masa gadai telah habis dan uang belum dikembalikan kepada pemilik uang dikarenakan belum adanya uang yang cukup, maka seringkali masa gadai akan diperpanjang sampai batas tak tentu.

Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik melakukan penelitian dan menyusun sebuah skripsi berjudul “Akad Gadai Kebun Jagung di Desa Natam Baru, Badar, Aceh Tenggara Dalam Perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN)”.

Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan perspektif fatwa Dewan Syariah Nasional mengenai pelaksanaan akad gadai kebun jagung pada masyarakat di desa Natam Baru.

Perjanjian gadai dalam Islam disebut *Rahn*, yaitu perjanjian menahan suatu barang sebagai tanggungan utang. *Rahn* secara etimologis adalah الرَّهْنُ وَالْثُبُوتُ yang berarti *tsubut* (tetap) dan *dawan* (kekal, terus menerus), seperti dalam kalimat مَاءٌ رَاهِنٌ, yang berarti air yang tenang.²

¹Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat, Hukum Perdata Islam* (Yogyakarta: UII perss, 1993), hlm. 6.

²Dr Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2012), hal. 289.

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) adalah Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* (Gadai) diatur dalam Al-Quran, sunnah dan ijtihad.³

1. Firman Allah, QS *Al-Baqarah*/2: 283:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً.....

“Jika kamu dalam perjalanan sedang engkau tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh orang berpiutang)...”

2. Hadist Nabi Riwayat al-Bukhari dan Muslim dari ‘Aisyah r.a., ia berkata:
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ.
“Sesungguhnya Rasulullah SAW pernah membeli makanan dengan berutang dari seorang Yahudi, dan Nabi menggadaikan sebuah baju besi kepadanya”
3. Hadist Nabi Riwayat al-Syafi’i, al-Daraquthni, dan Ibnu Majah dari Abu

Hurairah, Nabi SAW bersabda:

لَا يَغْلُقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهْنَهُ، لَهُ غَنَمُهُ وَ عَلَيْهِ غَرْمُهُ.

“Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung risikonya”

4. Hadist Nabi Riwayat Jema’ah, kecuali Muslim dan al-Nasa’i, Nabi SAW
bersabda:

الظَّهْرُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيُشْرَبُ النَّفَقَةُ.

“Tanggungan (kendaraan) yang digadaikan boleh dinaiki dengan menanggung biayanya dan binatang ternak yang digadaikan dapat diperah susunya dengan menanggung biayanya. Orang yang menggunakan kendaraan dan pemerah susu tersebut wajib menanggung biaya perawatan dan pemeliharaan”

5. *Ijma’*: Para ulama sepakat membolehkan akad *Rahn* (al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, 1985, V: 181).

³Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Indonesia MUI* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2014), hal. 736.

6. Kaidah Fiqih:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلُّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Pada dasar segala bentuk muamalat boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”

Fatwa Dewan Syariah Nasional, hukum tentang gadai ialah bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan dalam bentuk *rahn* dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Penerima gadai (*murtahin*) mempunyai hak untuk menahan barang jaminan (*marhun*) sampai semua utang penggadai (*rahin*) dilunasi.
2. *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahin*. Pada prinsipnya, *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizin *rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan pemanfaatannya itu sekadar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.
3. Pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahin*.
4. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
5. Penjualan *marhun*.
6. Apabila jatuh tempo, *murtahin* harus memperingatkan *rahin* untuk segera melunasi utangnya.
7. Apabila *rahin* tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka *marhun* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.
8. Hasil penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
9. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahin*.

2. METODE

Jenis penelitian yang digunakan merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu meneliti langsung ke lapangan pada masalah yang akan diteliti.⁴

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Menurut Lexy J. Moleong penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.⁵

Peneliti mengambil tempat penelitian di Desa Natam Baru, Kecamatan Badar, Kabupaten Aceh Tenggara sebagai daerah penelitian. Adapun yang menjadi subyek penelitian adalah pihak-pihak yang terlibat dalam penelitian ini, yaitu (*rahin*) pemilik kebun jagung atau penggadaai, (*murtahin*) yang menerima gadai.

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Wawancara (*interview*). Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (responden).⁶

Teknik analisis data yang digunakan oleh penulis ialah kualitatif. Analisis ini merupakan kegiatan yang dilakukan oleh peneliti pasca pengumpulan data di lapangan. Data berupa informasi yang telah diperoleh dari wawancara mendalam dan dokumentasi dikumpulkan menjadi satu dan kemudian dilakukan pengorganisasian data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensitensikan dan menemukan pola yang kemudian dapat membantu peneliti untuk menentukan mana data yang penting dan yang tidak penting untuk dipelajari.⁷

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Di desa Natam Baru sering terjadi transaksi gadai dengan cara menggadaikan sertifikat rumah dan tanah. Selama masa gadai yang terjadi pada masyarakat desa Natam Baru hak pemegang barang jaminan tersebut berada dalam kekuasaan penerima gadai (*murtahin*) dan pada umumnya memanfaatkan barang jaminan (*marhun*) tersebut,

⁴Muhammad Teguh, *Metode Penelitian Ekonomi Teori dan Aplikasi*, cet. ke-2, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hal. 14.

⁵Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2000), hal. 3.

⁶Rianto Adi, *Metodelogi Penelitian Sosial dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2004), hal. 72.

⁷Nasution, *Metode Research* (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), hlm. 67.

meskipun dengan adanya perjanjian ataupun tanpa perjanjian dikarenakan kebutuhan mendesak dari penggadai (*rahin*) yang menjadikan *murtahin* memanfaatkan barang gadai tersebut.

Analisis dari segi akad, pelaksanaan gadai yang dilakukan oleh penggadai (*rahin*) dan penerima gadai (*murtahin*) sudah sesuai dengan rukun dan syarat gadai secara syara'.

a). Orang yang berakad (*rahin* dan *murtahin*), b). Shigat (lafadz ijab dan kabul), c). Utang (*al-marhun bih*), d). Barang jaminan (*marhun*).⁸

Analisis dari segi gadai, gadai kebun jagung pada masyarakat di desa Natam Baru, Badar, Aceh Tenggara telah memenuhi rukun dan syarat gadai secara syara'. Dalam hal ini kebiasaan yang diterapkan oleh masyarakat sejak lama mengenai pemanfaatan barang jaminan (*marhun*) menjadi permasalahan dalam hukum Islam.

Analisis dari segi fatwa Dewan Syariah Nasional, praktik gadai kebun jagung pada masyarakat desa Natam Baru, Badar, Aceh Tenggara dalam hal pemanfaatan *marhun*, meskipun pihak *murtahin* bermaksud untuk menolong namun dalam kenyataannya pihak *murtahin* memanfaatkan *marhun* selama *rahin* meminjam uang.

Dari analisis tersebut, dapat dikatakan bahwa akad gadai kebun jagung yang terjadi di desa Natam Baru pada dasarnya dari beberapa kasus yang penulis temukan telah memenuhi unsur-unsur gadai menurut hukum syara' baik rukun maupun syarat gadai. Dan dalam perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) terhadap akad gadai kebun jagung pada masyarakat desa Natam Baru kecamatan Badar kabupaten Aceh Tenggara ini ialah tidak sah, dikarenakan adanya praktik pemanfaatan barang gadai (*marhun*) oleh *murtahin*, pemanfaatan *marhun* cenderung terjadi sebab berawal dari akad atau perkataan *rahin* yang seringkali berucap secara langsung atau tidak langsung bahwa barang gadai itu boleh dipergunakan atau dimanfaatkan.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Kesimpulan yang diambil adalah : *Pertama*, Mekanisme akad gadai kebun jagung yang terjadi di desa Natam Baru pada dasarnya dari beberapa kasus yang penulis temukan telah memenuhi unsur-unsur gadai menurut hukum syara' baik rukun maupun

⁸Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), hal. 253.

syarat gadai. Tetapi seringnya terjadi pada masyarakat adalah terdapatnya unsur pemanfaatan atas *marhun* oleh *murtahin*. Oleh sebab itu sangatlah jelas terlihat adanya kesalahan dalam melakukan akad gadai atau perjanjian gadai pada masyarakat desa Natam Baru kecamatan Badar kabupaten Aceh Tenggara. *Kedua*, Tinjauan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) terhadap akad gadai kebun jagung pada masyarakat desa Natam Baru kecamatan Badar kabupaten Aceh Tenggara ini ialah tidak sah, dikarenakan adanya praktik pemanfaatan barang gadai (*marhun*) oleh *murtahin*, pemanfaatan *marhun* cenderung terjadi sebab berawal dari akad atau perkataan *rahin* yang seringkali berucap secara langsung atau tidak langsung bahwa barang gadai itu boleh dipergunakan atau dimanfaatkan. Dan meskipun pihak *murtahin* bermaksud untuk menolong, namun *murtahin* sering pula mengambil manfaat dari *marhun* tersebut.

4.2 Saran

- a. Praktik gadai yang terjadi pada masyarakat di desa Natam Baru kecamatan Badar kabupaten Aceh Tenggara ini harus diperhatikan akad yang dilakukan oleh *rahin* dan *murtahin* harus sesuai dengan hukum Islam, karena akad dalam transaksi gadai sangatlah penting dan menjadi penentu dalam sah atau tidaknya suatu transaksi gadai yang dilakukan oleh *rahin* dan *murtahin*.
- b. Manusia mempunyai hasrat hidup bersama, lebih-lebih dalam masyarakat yang tidak lepas dari kehidupan sosial yang tinggi. Tidak mungkin bagi seseorang hidup secara layak dan sempurna tanpa bantuan dari orang lain. Maka kerjasama antara masyarakat merupakan suatu kebutuhan.
- c. Dalam praktik gadai kebun jagung di desa Natam Baru kecamatan Badar kabupaten Aceh Tenggara sangat rentan dengan pemanfaatan *marhun* oleh *murtahin*. Oleh sebab itu, bagi *rahin* hendaklah lebih berhati-hati dalam memilah-milah mana praktik gadai yang diridhoi Allah SWT atau yang sesuai dengan hukum Islam. Dan bagi *murtahin* yang memanfaatkan *marhun* tersebut meskipun ada ataupun tidak adanya perjanjian dalam hal memanfaatkan *marhun* tidaklah benar dalam hukum syara'. Jadi mulailah melakukan praktik gadai yang sesuai dengan syariat Islam serta gunakanlah aturan-aturan yang sesuai

dan dibenarkan oleh agama serta tidak merugikan masyarakat yang membutuhkan pertolongan.

- d. Dalam melaksanakan praktik gadai prinsip saling tolong menolong jangan sampai terabaikan. Dan yang sering terlupakan dalam melakukan akad gadai antara lain *rahin* dan *murtahin* harus ada kejelasan waktu pengembalian hutang, sehingga pelaksanaan gadai tidak berlarut lama.
- e. Dalam hal ini penulis tentunya mempunyai keterbatasan kemampuan dalam pelaksanaan penelitian ini sebagai tugas akhir, kekurangan dan kesalahan pasti ada, maka untuk lebih memperbaiki hal ini penulis mengharapkan kritik dan saran agar kedepannya menjadi lebih baik lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Rianto. 2004.*Metodelogi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit.
- Basyir, Ahmad Azhar. 2000.*Asas-asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*. Yogyakarta: UII Press.
- Ghazaly, Abdul Rahman. Ghufroon Ihsan dan Sapiudin Shidiq. 2010.*Fiqh Muamalat*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Majelis Ulama Indonesia. 2014.*Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Indonesia MUI*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Mardani, Dr. 2012.*Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana.
- Moleong, Lexy J. 2000. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Nasution. 2004.*Metode Research*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Teguh, Muhammad. 2001.*Metode Penelitian Ekonomi Teori dan Aplikasi*, cet. ke-2. Jakarta: Raja Grafindo Persada.